

ABSTRAK

Penelitian ini disusun dengan judul “Hubungan Masyarakat Pemerintah Dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Selatan – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)”.

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tugas dan fungsinya adalah mengawal proses perencanaan pembangunan, mendukung pengendalian pelaksanaannya, serta memantau keberlanjutannya dengan memastikan tercapainya *outcome* atau manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi antara lain adalah pada struktur kelembagaan yang sangat ramping dan dipimpin langsung oleh Kepala Satker, juga pada ketersediaan ruang dan peralatan kerja pendukung yang belum memadai, dan terkait kejelasan kewenangan serta akses terhadap data dan informasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memiliki pemahaman secara utuh terkait peran Humas Pemerintah dalam penyebaran informasi pembangunan daerah dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi terkait pembangunan citra positif institusi pemerintah, serta yang diharapkan pula untuk dapat mendukung kinerja pelaksanaan program pembangunan pemerintah secara efisien dan efektif.

Metode penelitian adalah dengan pengumpulan data yang ditentukan oleh beberapa aspek, di antaranya paradigma, pendekatan, teknik, dan jenis penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kajian pustaka, pengamatan media, wawancara mendalam, pengamatan langsung pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di lapangan, dan dilengkapi dengan dokumentasi.

Selanjutnya, hasil penelitian diuraikan secara naratif, khususnya terhadap hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan beberapa informan yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dan institusi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang humas pemerintah.

Diharapkan pada perkembangannya ke depan, bidang kehumasan skala provinsi ini dapat dibentuk menginduk pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dengan struktur organisasi yang mandiri, yang dapat menjamin alokasi anggaran kehumasan terkait ruang dan peralatan kerja pendukung yang memadai. Pekerjaan kehumasan juga harus diperkuat dengan sumber daya manusia profesional, yang tidak hanya memiliki kemampuan dasar kehumasan dalam hal kemampuan *public speaking* dalam penyampaian informasi, tapi juga harus memiliki kemampuan analitis agar dapat bekerja optimal dalam menjawab keluhan masyarakat dan menanggapi pemberitaan negatif. Bagian penting lainnya adalah harus segera disusunnya Pedoman Teknis bidang kehumasan yang akan menguraikan secara jelas terkait kewenangan serta efisiensi dan efektivitas akses terhadap data dan informasi.